

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang terus berusaha mengadakan pembangunan pada semua sektor. Pembangunan-pembangunan ini dimaksudkan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila agar terwujud kehidupan bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan ini bertujuan agar roda perekonomian di Indonesia tidak terhambat dan tersendat. Kegiatan pembangunan yang masif ini menghabiskan cukup besar dana yang tidak dapat dihindari. Sumber-sumber penerimaan dana dan pos-pos pengeluaran dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan di semua lini sektor tersebut salah satunya berasal dari hasil partisipasi warga negara berupa pajak.

Semua negara di dunia pastilah memerlukan sumber dana yang berasal dari pajak karena adalah salah satu pendapatan terbesar satu negara. Bahkan di Indonesia, dari sektor perpajakanlah penerimaan negara hingga saat ini sudah mencapai 70% dari semua total penerimaan negara. Kontribusi penerimaan pajak sangat diharapkan sekali dapat meningkat dengan kebutuhan negara yang terus meningkat dan mewujudkan semua kegiatan ekonomi mandiri yang dsudah dicanangkan pemerintah. Jika tidak ada pajak, mustahil kegiatan suatu negara akan berjalan lancar.

Soemitro yang dikutip dalam Priantara (2012:2) berpendapat bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara. Priantara dalam bukunya (2012:2) berpendapat bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan pasal 1, ayat 1 menjelaskan bahwa pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah yang bersifat memaksa yang digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan cara sifat, pemungutan, dan lembaga pemungutnya. Jenis-jenis pajak meliputi:

- a. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung;
- b. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif;
- c. Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

Dari jenis-jenis pajak yang ada di Indonesia salah satunya bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah juga merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Priantara (2012:543) berpendapat bahwa Pajak Daerah secara umum

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada kala ini pemungutan atas pajak daerah didasari dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai perubahan atas undang-undang yang berlaku sebelumnya. Dalam UU no. 28 tahun 2009, pajak daerah terbagi dua yaitu pajak provinsi yang meliputi:

- a. pajak kendaraan bermotor (PKB),
- b. bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB),
- c. pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB),
- d. pajak air permukaan, dan
- e. pajak rokok.

Sedangkan pajak kabupaten/kota meliputi:

- a. pajak hotel,
- b. pajak restoran,
- c. pajak hiburan,
- d. pajak reklame,
- e. pajak penerangan jalan (PPJ),
- f. pajak mineral bukan logam dan batuan,
- g. pajak parkir,
- h. pajak air tanah,
- i. pajak sarang burung walet,

- j. pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, serta
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Dari sekian banyak jenis Pajak Daerah yang dikemukakan di atas yang akan menjadi pembahasan penulis adalah Pajak Air Tanah, yang merupakan pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan salah satu pendapatan potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dalam penyelenggaraan Pajak Air Tanah, Pemerintah Daerah Kota Surabaya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya harus diawasi prosesnya agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah setempat. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya mempunyai andil yang sangat besar dalam penyelenggaraan Pajak Air Tanah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya diminta agar selalu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perpajakan. Dalam pelaksanaan pengenaan dan penghitungan pajak tentulah pemerintah mendapatkan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak Air Tanah ini harus meningkatkan kinerjanya semaksimal mungkin dalam kondisi perkembangan bisnis yang sangat pesat, sehingga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari masyarakat yang belum mengetahui cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak air tanah sampai membayarkan pajak terutanganya, adanya peraturan baru yang mengharuskan wajib pajak air tanah melakukan perubahan data, hingga berapa kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan asli Kota Surabaya dari mekanisme pengenaan dan penghitungan pajak air tanah yang berlaku. Apabila

permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut dapat diselesaikan secepatnya, tentunya hal ini dapat meningkatkan penerimaan daerah sehingga dapat membiayai pembangunan daerah.

Banyaknya tugas yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dalam pengelolaan Pajak Air Tanah ini tentunya bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Sebab itu, dirasa penulis perlu untuk dibahas lebih lanjut tentang hal apa saja yang harus dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dalam pengelolaan Pajak Air Tanah di Kota Surabaya. Hal inilah yang menjadikan penulis memilih Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sebagai tempat praktik dan memilih judul **“MEKANISME PENGENAAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA”**.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Untuk mengetahui mekanisme pengenaan dan penghitungan pajak air tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.

1.3 Manfaat Studi Lapang

- a. Bagi penulis dari penelitian ini mampu memberikan wawasan pengetahuan tentang mekanisme pengenaan dan penghitungan pajak air tanah.
- b. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya dari penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam membuat dan mengambil keputusan di masa yang akan datang.

- c. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan dijadikan bahan informasi sebagai penelitian selanjutnya yang kaitannya dengan mekanisme pengenaan dan penghitungan pajak air tanah.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan ini, hal ini bertujuan agar arah pembahasan ini tidak terlalu luas. Oleh karena itu, penulis hanya membahas tentang mekanisme pengenaan dan penghitungan pajak air tanah di daerah Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut maka itu penulis memakai beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya.
- b. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada seorang informan (pemberi informasi). Dalam metode ini data diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya mengenai mekanisme pengenaan dan penghitungan pajak air tanah.

- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan mekanisme pengenaan dan penghitungan pajak air tanah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sehingga dapat menjadi manfaat saat menganalisis data.

